

Hutan Lindungpun Beralih Peruntukan

Akibat kepentingan industrialisasi semen, 412 hektar hutan lindung diubah menjadi hutan produksi. Izin Menteri Kehutanan untuk mengubah peruntukan kawasan hutan lindung di Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat menjadi hutan produksi akhirnya keluar. Kini status hutan lindung tersebut berubah menjadi hutan produksi.

"Artinya, bagi DPRD Padang tidak punya alasan lagi menunda pembahasan revisi Perda RT/RW Padang yang salah satu itemnya termasuk lahan 412 hektar tersebut," kata Wakil ketua DPRD Padang Afrizal di DPRD Padang, Rabu (7/9). Sebelumnya, DPRD Padang sepakat menunda dulu pembahasan revisi Perda RT/RW Padang, sebelum keluar izin Menhut RI terkait peralihan peruntukan kawasan hutan 412 hektar tersebut. "Kita tidak mau kerja dua kali, tapi kalau sekarang kita siap menuntaskannya sampai Oktober ini," ujarnya.

Lahan 412 hektar terletak di kawasan perbukitan batu kapur, dari penelitian ahli, kata Afrizal lahan tersebut memiliki kandungan melimpah atas bahan baku semen. Memang lahan itu menjadi primadona sejak beralih peruntukannya. Dengan adanya lahan itu PT Semen Padang bisa survive memproduksi semen sampai 50 tahun kedepan.

Tapi meski telah disetujui Menhut RI menurut Ketua Komisi III DPRD Sumbar Nurnas, lahan 412 hektar tidak otomatis milik PT Semen Padang. "Tidak ada di SK Menhut RI itu, alih fungsi 412 Hektar untuk PT Semen Padang otomatis. Kita harus negosiasi dulu dengan PT Semen Padang atas nama masyarakat Sumbar dan Padang," ujar Nurnas.

Bahkan lebih keras lagi Anggota DPRD Sumbar Djonimar Boer yang mendesak Gubernur Sumbar mencari investor pabrik semen baru untuk menggarap 412 hektar tersebut. "Sudahlah, PT Semen Padang selama ini kontribusinya sangat minim kok, kalau memang ada CSR itu pun kewajiban UU Perseroan, dan itu bukan yang kita maksud," ujarnya.

Meski Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan tidak banyak investor berminat bangun pabrik semen baru di luar PT Semen Padang, Ketua DPD PDI Perjuangan Alex Indra Lukman menolak sinyalemen Irwan tersebut. "Siapa bilang investor tidak tertarik bisnis pembuatan semen, pasarnya jelas kok, sekarang itu gubernur punya niat tidak untuk mengundang investor. Karena selama ini kita tahu sama tahu kalau PT Semen Padang kontribusinya bagi Sumbar sangat minim sekali, jangan menyerah sebelum berusaha," ujar Alex.

Senada dengan Afrizal, Ketua Pansus RT/RW DPRD Padang Yendril, mengatakan sah saja ada wacana Perusda, untuk menyikapi kandungan potensi 412 hektar.

"Tapi Pemko Padang harus ganti kembali uang PT Semen Padang yang sudah keluar untuk mengganti silih gantinya lahan tersebut," ujarnya.

Tetapi meski DPRD Padang cenderung melepas 412 hektar ke PT Semen Padang, Afrizal mengingatkan manajemen PT Semen Padang atau pun induknya PT Semen Gresik Group tidak lupa kacang dengan kulitnya. "Pentingnya 412 hektar bagi PT Semen Padang semua warga kota ini sudah tahu. Sebab tanpa lahan tersebut, Pabrik Indarung VI tidak akan pernah dibangun," ujar Afrizal.

Jadi kata politisi Partai Golkar ini, disahkannya Perda Revisi RT/RW Oktober ini, PT Semen Padang harus serius mengakomodir aspirasi masyarakat Padang terutama yang berada di ring satu pabrik itu, yakni warga di Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung.